

KESENJANGAN SOSIAL SEBAGAI AKAR PROPAGANDA GERAKAN SEPARATIS-TERORISME DI PAPUA

SOCIAL INEQUALITY AS THE ROOTS OF PROPAGANDA MOVEMENT OF THE SEPARATIST-TERRORISM IN PAPUA

Ganda Halomoan Sitorus, Zora Sukabdi, dan Novi

UNIVERSITAS INDONESIA/SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK & GLOBAL
(gandahalomoansitorus@gmail.com, zsukabdi@gmail.com, psrb.novi@gmail.com)

Abstrak – Tidak meratanya pembangunan membuat adanya kesenjangan dan alienasi terhadap masyarakat Papua yang bisa melahirkan konflik horizontal, salah satunya propaganda negatif. Konflik di Papua memang sudah lama terjadi karena adanya sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), identitas politik, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan Papua, dan juga inkonsistensi pemerintah Indonesia, dan marginalisasi masyarakat Papua. Konflik tersebut melahirkan penyelesaian represif dari pemerintah yang membuat stigma peminggiran terhadap masyarakat Papua. Hal tersebut menyulut para orang atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuat narasi dan propaganda negatif yang disebarluaskan melalui media sosial. Penyebaran narasi yang cepat ini menjadi keuntungan kelompok tertentu dalam penggiringan opini serta tujuan yang ingin dicapai. Adu domba masyarakat dan pemerintah juga menjadi polemik yang berbahaya dalam melahirkan sebuah gerakan separatisme berbentuk teror. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam paradigma fenomenologi, dengan pemantauan berbagai media sosial yang terkait, studi pustaka, serta laporan atensi pemerintah dalam melihat masalah Papua. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kesenjangan sosial dan alienasi dijadikan propaganda oleh orang dan atau kelompok orang yang dapat menyulut serta menggiring opini publik bahwa pembebasan Papua dibenarkan dan menyulut gerakan separatis teroris di Papua.

Kata Kunci : kesenjangan sosial, kekerasan, media, propaganda, separatis – terorisme

Abstract – Unequal development creates gaps and alienation for Indonesian people who lives in Papua which can lead to horizontal conflicts, which is negative propaganda. The conflict in Papua has been going on for a long time because of the history of Papua's integration into the territory of the Republic of Indonesia, political identity, violence and human rights violations, the development of Papua, as well as the inconsistency of the Indonesian government, and the marginalization of the Papuan. The conflict gave birth to a repressive solution from the government which created a stigma of marginalization against the Papuan. This triggers irresponsible people or groups of people to create negative narratives and or propaganda that is spread through social media. This spreading is an advantage for certain groups to driving opinions and goals to be achieved. The conflict between the community and the government has also become a dangerous polemic in the birth of a separatist movement in the form of terror. This research used qualitative approach by monitoring various related social media, literature studies, as well as reports on the government's attention to the problem of Papua. This research wants to see how social inequality and alienation are used as propaganda by people and or groups of people who can ignite and lead public opinion that the liberation of Papua is justified and triggers terrorist separatist movements in Papua.

Keywords: media, propaganda, social gap, separatist – terrorism, violence

Pendahuluan

Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari pulau We sampai pulau Rote. Memiliki keanekaragaman dan juga lima pulau yang sangat besar. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan sentralisasi pemerintahan berada di Pulau Jawa, masih banyak ketimpangan pembangunan di Indonesia. Akses transportasi, sumber daya manusia merupakan kendala yang paling besar untuk melakukan pembangunan di sebuah wilayah, salah satunya pembangunan di wilayah timur Indonesia, Papua (Djo, 2020).

Tidak meratanya pembangunan membuat adanya kesenjangan dan alienasi terhadap masyarakat Papua yang jika isunya tersulut dalam propaganda negatif akan muncul konflik-konflik dalam wilayah tersebut. Djo (2020) menjelaskan bahwa konflik di Papua memang sudah lama terjadi karena adanya sejarah integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), identitas politik, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan Papua, dan inkonsistensi pemerintah Indonesia, dan marjinalisasi masyarakat Papua.

Konflik-konflik tersebut melahirkan penyelesaian dari pemerintah dengan pendekatan yang represif. Hal tersebut membangkitkan trauma serta memperlambat proses pembangunan

di wilayah Papua (Djo, 2020, 20). Masyarakat Papua menganggap bahwa tindakan represif ini sebagai bentuk peminggiran wilayah Papua dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Selain itu ada pula pemerhati Hak Asasi Manusia yang menyoroti kesenjangan yang ada di Papua. Ditambah dengan tindakan represif negara inilah yang membuat para kelompok tidak bertanggungjawab membangun opini publik tentang pemerintah, kesenjangan sosial, dan alienasi di Papua.

Bentuk yang digunakan dalam penyebaran informasi dan pembangunan opini dilakukan dalam wadah media sosial. Penyebaran yang cepat ini menjadi keuntungan kelompok tertentu dalam penggiringan opini serta tujuan yang ingin dicapai. Adu domba masyarakat dan pemerintah juga menjadi polemik yang berbahaya dalam melahirkan sebuah gerakan separatisme berbentuk teror.

Seperti contoh narasi propaganda yang dibangun adalah akun Facebook dari Benny Wenda yang memiliki lebih dari 175.000 pengikut yang menyebarkan konten provokasi dengan mengecam langkah Pemerintah Indonesia memutus jaringan internet Papua. Konten tersebut mendapat komentar yang beragam dan menjadikan satu informasi ini sebagai bentuk ketidakadilan dan keinginan untuk mengganti ideologi, serta setuju dengan pembebasan Papua Barat.

Oleh karena itu, tulisan ini akan melihat bagaimana kesenjangan sosial dan alienasi dijadikan propaganda oleh orang dan atau kelompok orang yang dapat menyulut serta menggiring opini publik bahwa pembebasan Papua dibenarkan dan penyulut gerakan separatis terorisme di Papua.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam membantu pembentukan serta olah data dalam penelitian ini. Bentuk metode kualitatif menurut Neuman bentuknya lebih kepada tulisan maupun lisan, tindakan, simbol, objek secara fisik, merepresentasikan tentang kehidupan sehari-hari. Pengukuran pada pendekatan kualitatif terjadi pada saat terjadi proses pengumpulan data (Lawrence, 2007, 116-117). Penelitian kualitatif dalam paradigma fenomenologi menjadi sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok dalam menanggapi suatu masalah sosial atau manusia (Creswell, 2009). Fenomenologi merupakan cara peneliti untuk memaknai pengalaman hidup orang dan pengalaman mereka akan akan sebuah isu yang telah ditetapkan oleh penulis (Alase, 2017). Dalam penelitian ini, penulis akan melihat kesenjangan sosial dan alienasi dijadikan propaganda oleh orang

dan atau kelompok orang yang dapat menyulut serta menggiring opini publik bahwa pembebasan Papua dibenarkan dan penyulut gerakan separatis terorisme di Papua.

Dalam penelitian ini, sumber data mengarah kepada studi pustaka, laporan atensi lembaga negara terkait propaganda negatif di Papua, dan pemantauan sosial media orang atau kelompok orang terkait pembentuk opini negatif terhadap pemerintah dalam menangani permasalahan di Papua. Pemilihan sumber data ini didasarkan pada keterkaitan topik suatu penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi serta argumen yang dapat mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan akan dipusatkan pada literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Lalu untuk laporan atensi, serta pemantauan dalam sosial media terkait dilakukan sebagai bahan acuan analisis penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Teori *Framing*

Bingkai merupakan perangkat yang berguna bagi manusia untuk memahami dunia dalam semua jenis situasi sehari-hari. Dalam tradisi psikologis, karya Kahneman dan Tversky (1984) biasanya disebut sebagai titik awal. Mereka mengembangkan teori prospek, yang

menunjukkan bahwa informasi baru dievaluasi dengan sangat berbeda tergantung pada apakah kerangka keuntungan atau kerugian diterapkan padanya (Vreese, 2016, 2).

De Vreese membedakan dua faktor untuk pembingkai dalam berita, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kebijakan redaksional dan nilai berita, yang membentuk kerja wartawan sehari-hari. Misalnya, nilai berita yang berfokus pada pembingkai yang dilakukan oleh jurnalis tentang peristiwa internasional dalam kaitannya dengan konsekuensi ekonomi domestik, selain itu nilai berita *human interest* sering diterjemahkan kedalam cerita tentang suatu peristiwa yang dipusatkan pada individu tertentu. Selanjutnya ada faktor eksternal yakni adanya pengaruh elit, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial. Dalam pembahasan ini ada pengaruh kepentingan elit terhadap isu pembebasan Papua yang mana membingkai isu kesenjangan sosial kepada masyarakat yang mudah tersulut.

Dalam jurnal De vresse (2016), *Framing Theory* ini juga menjelaskan pengaruh pembingkai ini yakni memengaruhi pemahaman warga negara tentang berbagai masalah politik. Studi efek *framing* melihat efek dari frame pada interpretasi isu, kompleksitas kognitif, opini publik, dan dukungan isu. Beberapa studi tentang *framing* menunjukkan

bahwa bingkai berita memengaruhi pemrosesan informasi, yaitu, bagaimana warga mengintegrasikan informasi yang dibingkai kedalam persediaan mental mereka dan bagaimana mereka “memahami” isu politik.

Media dan Isu Kekerasan

Media adalah ruang utama dimana kekuasaan telah ditentukan, selain itu juga memiliki kemampuan yang luas untuk membentuk sebuah opini publik (Castells, 2007). Di antara media lainnya, instrumen media *online* dan dunia maya adalah agen konstruksi yang terkemuka untuk kelompok, individu, dan institusi. Terutama platform media sosial seperti facebook, twitter, tumblr, youtube, dan lain sebagainya. Media membantu menciptakan bentuk baru ruang publik, yang dalam hal ini, orang dapat berinteraksi tanpa perlu berbagi tempat yang sama atau mengarahkan kontak fisik (Ozeren, 2018, 107-108).

Ada hubungan yang hampir simbiotik antara isu sensitif, yakni rasisme, terorisme, konflik dan media ketika isu tersebut menyediakan cerita-cerita menarik dan penuh kekerasan yang membantu menjual produk berita dan media, memberi kelompok-kelompok teroris sarana untuk menyebarkan pesan mereka dan menciptakan ketakutan di kalangan umum (Spencer, 2012, 6).

Propaganda

Propaganda merupakan sebuah bahan bakar dalam pencarian dukungan yang merupakan salah satu persyaratan paling penting perang. Individu ataupun kelompok bisa melihat dunia dengan dibingkai dan dibangun dari propaganda bahasa yang ditawarkan dan media yang menggemakannya (Steuter, 2008, 17). Lasswell (1927) juga menjelaskan bahwa propaganda ini memiliki lima unsur, yakni komunikator, pesan, media, tujuan, dan penerima. Dalam studi Nasution (2020) dijelaskan bahwa salah satu prinsip dalam propaganda adalah kelompok sasaran, untuk mengetahui dan atau memilih sasaran yang cocok.

Propaganda merupakan sebuah bahan bakar dalam pencarian dukungan yang merupakan salah satu persyaratan paling penting dalam sebuah masalah. Individu ataupun kelompok bisa melihat dunia dengan dibingkai dan dibangun dari propaganda bahasa yang ditawarkan dan media yang menggemakannya (Steuter, 2008, 17). Propaganda ini sangat luas dan mencakup berbagai hal positif maupun negatif. Jadi, propaganda ini bisa diterapkan untuk memahami berbagai bentuk dimana propaganda tersebut muncul. Propaganda tidak peduli dengan penyebaran informasi tetapi dengan emosi yang saling bertentangan. Niat Propaganda bukan untuk mendidik tetapi untuk menghasilkan dan mengarahkan

emosi, serta mempersempit pemikiran. Yang paling terpenting adalah untuk memastikan bahwa emosi publik mendominasi diskusi publik. Propaganda mungkin sangat efektif untuk mencapai hal ini karena sering menggunakan teknik untuk secara terampil mengeksploitasi “keyakinan atau nilai atau norma kelompok audiens sedemikian rupa untuk mengobarkan api prasangka atau kepentingan pribadi” (Ali, 2020, 4-5).

Propaganda adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk meyakinkan publik tentang kejahatan musuh dan keadilan atas alasannya sendiri. Ketika propaganda menyebar melalui wacana publik, lalu diartikulasikan kembali oleh media itu pasti akan mempengaruhi opini publik.

Dari kasus yang diangkat yakni, propaganda isu rasisme yang menjadi cikal bakal gerakan separatis terorisme di Papua. Propaganda media ini memiliki efek yang begitu cepat, karena kemudahan aksesnya dan ketidakkritisannya dalam memahami isu. Ketika propaganda menyebar melalui wacana publik, lalu diartikulasikan kembali oleh media itu pasti akan mempengaruhi opini publik.

Kesenjangan Sosial dan Alienasi

Papua dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, yakni tembaga, emas, tapi memiliki kemiskinan yang tinggi juga (Padmi, 2019, 68-69).

Masyarakat di wilayah Papua, khususnya masyarakat adat, kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan dan partisipasi sosial. Perampasan ini telah memicu keluhan di antara orang Papua dan menciptakan gesekan dan konflik antara Tentara Nasional Indonesia, orang migran dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Papua.

Kesenjangan dan alienasi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu yang membuat mereka gigih untuk memperjuangkan, tapi penduduk Papua merasa ada tindakan represif dari negara yang melanggar Hak Asasi Manusia. Alienasi merupakan perasaan keterasingan, terpinggirkan individu terhadap kondisi-kondisi di sekitarnya.

Dalam pembahasan kali ini akan melihat bahwa kesenjangan dan alienasi ini bisa menjadi bahan dasar orang atau kelompok orang yang akan membentuk opini publik. Opini ini dibesarkan menjadi propaganda dengan narasi negatif guna mencapai tujuan sebuah kelompok.

Peran Media terhadap Opini Publik

Media berperan dalam menyebarkan informasi kepada publik. Relasi antara produsen media dengan audiens menimbulkan terjadinya sosialisasi. Akan tetapi, dewasa ini pengguna media, baik produsen atau konsumen, memiliki otoritasnya sendiri dalam membuat atau

menyebarkan ke publik lain terkait isu atau informasi yang ada.

Dari sini kita dapat melihat bahwa pemberitaan kelompok di media akan berdampak pada opini publik dan kesalahan berpikir. Peran media untuk hal tersebut sangat banyak, salah satunya adalah media berpengaruh terhadap psikologi massa yang berujung pada pembentukan sikap dan pada akhirnya timbul reaksi emosional di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Burton (2005), pemberi informasi, disadari atau tidak, adalah aktor yang membentuk 'ideologi dominan' di ruang berita, sehingga mengindoktrinasi pembaca ke dalam keadaan 'kesadaran palsu'. Kesadaran palsu inilah yang kemudian mendorong bagaimana seseorang bersikap atas suatu kejadian sehingga muncul reaksi emosional di kalangan masyarakat. Munculnya kesadaran palsu tersebut disebabkan oleh adanya pengulangan berita yang kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca bergantung pada konteks pengalaman mereka masing-masing (Burton, 2005, 303-304).

Dalam kasus ini, peran media sebagai penyebar informasi dan membentuk opini publik memang benar. Dalam akun Benny Wenda yang reposting dari website ulmpw.org terkait dengan pembantaian yang dilakukan oleh Polisi dan TNI, membuat banyak komentar dari para

pengikut serta pembaca di akunnya. Ada beberapa orang yang sangat menyesali adanya teror tersebut dan adapula yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Benny Wenda ini merupakan palsu. Salah satu pengikutnya, Tamar Sofair menyatakan bahwa “*racist, fascist Indonesia murdering innocent Melanesian civilians, genocide, human rights violations, environmental catastrophes, deforestation, transmigration, pillage of resources, rape, false imprisonment, and corruption are crime against the Papuan people who call for freedom and independence and the end to over 50 years of brutal oppression.*” Kebanyakan orang yang menanggapi juga menginginkan Papua dibebaskan. Seharusnya pembaca juga harus lebih kritis melihat sumber informasi yang dibagikan oleh Benny Wenda, karena itu merupakan organisasi pembebasan Papua yang lebih dominan ke satu pihak. Foto dari pemberitaannya juga masih diragukan, apakah benar-benar saat kejadian atau seperti apa. Selain itu, pengecekan berita juga harus melihat dua pihak, dari pemerintah maupun Papua itu sendiri. Semua ini digunakan Benny Wenda untuk mendapatkan simpati dari dunia akibat kesenjangan dan juga alienasi di tanah Papua.

Media sebagai Wadah Propaganda

Propaganda merupakan sebuah bahan bakar dalam pencarian dukungan yang

merupakan salah satu persyaratan paling penting perang. Individu ataupun kelompok bisa melihat dunia dengan dibingkai dan dibangun dari propaganda bahasa yang ditawarkan dan media yang menggemakannya (Erin, 2008: 17). Propaganda tidak peduli dengan penyebaran informasi tetapi dengan emosi yang saling bertentangan. Niat Propaganda bukan untuk mendidik tetapi untuk menghasilkan dan mengarahkan emosi, serta mempersempit pemikiran. Yang paling terpenting adalah untuk memastikan bahwa emosi publik mendominasi diskusi publik.

Terdapat dua jenis propaganda, yakni propaganda putih dan propaganda hitam. *White propaganda* mengacu pada pesan yang dikeluarkan dari sumber yang terbuka dan diakui, menargetkan audiens tertentu dan tidak menyembunyikan sumbernya. Sedangkan *black propaganda* melihat pada pesan dari sumber yang tidak dikenal, sering didasarkan pada kebohongan dan atau rekayasa. Dalam jurnal *Terrorism, the Internet, and Propaganda* menjelaskan bahwa propaganda itu tidak sepenuhnya salah maupun benar dan tidak spesifik mengidentifikasi sumbernya.

Selain itu, adapula propaganda terlarang, yakni propaganda fitnah, propaganda subversif, atau propaganda hasutan untuk perang ataupun terorisme. Propaganda fitnah mengacu pada

komunikasi yang cenderung mencaci, menghina orang asing, lembaga negara, pemimpin negara, dengan maksud untuk mengganggu hubungan damai antar negara (Lieberman, 2017, 97-98). Kemudian, propaganda subversif merujuk pada komunikasi yang bermaksud menggulingkan pemimpin politik atau tatanan politik internal suatu negara. Yang terakhir adalah propaganda untuk perang maupun terorisme, yakni propaganda yang berniat untuk menanamkan kecenderungan ataupun keinginan untuk terlibat dalam atau menormalkan kekerasan yang melanggar hukum.

Dalam studi Nasution (2020) menjelaskan bahwa propaganda yang masif ini lahir dari media sosial yang perannya memicu konflik, karena mengurangi biaya komunikasi, meningkatkan kecepatan dan penyebaran informasi viral, adaptasi yang cepat dan data media sosial memberikan sumber informasi penting bagi pelaku konflik, sehingga membentuk konflik itu sendiri.

Kelompok separatis Papua bersama dengan beberapa pendukungnya di dalam dan luar negeri, termasuk para pegiat Hak Asasi Manusia, Amnesty International berusaha mengangkat isu alienasi, kesenjangan, rasisme terhadap masyarakat Papua. Salah satu pegiat HAM yakni Veronica Koman dalam akun twitternya melakukan *reposting* terhadap pemberitaan media *online* terkait

Papua, melakukan orasi pada aksi anti rasis di Australia. Dalam postingannya tersebut memperlihatkan video seorang perempuan asli Papua sedang berorasi menceritakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan menyerukan pembebasan Papua Barat di depan massa aksi gerakan #BlackLivesMatters di Australia pada 6 Juni 2020. Selain itu, ada beberapa pantauan dari penulis terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan penting, salah satunya Benny Wenda yang mengklaim dirinya sebagai Presiden sementara Ketua Pembebasan Papua Barat. Ia memiliki akun pengikut banyak yang tidak semuanya terbuka akan pemikiran kritis. Benny Wenda selalu menggiring opini negatif setiap apa yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Dalam akunnya, pada 4 Juni 2021 ia memberikan informasi terkait pemutusan internet di Papua Barat yang dilakukan pemerintah karena banyaknya peredaran konten hoaks, ujaran kebencian dan provokasi banyak menyebar di wilayah Papua dan Papua Barat yang bisa menimbulkan kerusuhan serta kericuhan pada saat itu. Tapi banyak sekali kritikan mengenai pemblokiran akses internet tersebut, karena membungkam hak bebas mendapatkan informasi serta berpendapat.

Lalu pada 7 Juni 2021, ia membagikan postingan mengenai video polisi yang turun dari helikopter dengan

pemberitaan bahwa Indonesia yang mengerahkan militer ke Intan Jaya untuk membunuh warga sipil. Jelas pada video yang berdurasi 6 detik tersebut tidak mengandung tujuan atau ingin membunuh masyarakat di distrik Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Nduga. Respons masyarakat juga beragam akibat postingan tersebut, baik yang pro maupun kontra. Salah satu yang pro menyebutkan bahwa “*stop this human rights violation. Get them out of West Papua. Malanesia people of West Papua need to be free from oppression and suppression by the colonial Indonesia. Free West Papua*”. Tapi ada pula yang kontra dengan postingan tersebut yang menyebutkan “video cuma 5 detik tanpa suara tembakan atau apa dibilang TNI tembak warga sipil hadohh stop jadi

untuk tanah Papua. Ketika propaganda menyebar melalui wacana publik, lalu diartikulasikan kembali oleh media, maka pasti akan mempengaruhi opini publik.

Kemudian, pada 9 Juni 2021, ia melakukan reposting dari website ulmpw.org terkait pembantaian yang dilakukan oleh Polisi dan TNI. Banyak dari warga Indonesia pro dan kontra terhadap postingan tersebut. Sangat disayangkan penyebaran propaganda hanya akan menyulut konflik separatisme.

Selain itu, ada pantauan penulis terhadap akun Natte Craess selaku anggota Komisi Nasional Papua Barat. Ia juga sering membuat narasi propaganda negatif terkait dengan pemberitaan Papua. Hal ini terus terus menggiring dan mengkristalkan opini publik bahwa

Tabel 1. Pantauan Facebook Benny Wenda

Akun Facebook	Benny Wenda 175.007 Pengikut
9 Juni 2021	Melakukan <i>reposting</i> dari website ulmpw.org terkait dengan pembantaian yang dilakukan oleh Polisi dan TNI.
7 Juni 2021	Melakukan propaganda negatif terhadap video polisi yang baru turun dari helikopter dengan berita rekaman video militer Indonesia yang mengerahkan militer ke Intan Jaya untuk membunuh warga sipil.
4 Juni 2021	Memberikan provokasi terkait pemutusan internet di Papua Barat.

Sumber: Diolah oleh penulis, Facebook, 2021

orang bodok dah”. Dari postingan Benny Wenda tersebut merupakan sebuah upaya meyakinkan masyarakat Papua yang ingin bebas dari Indonesia dan negara lain (publik) tentang kejahatan yang diberikan musuh dan ketidakadilan

pemerintah telah melakukan diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua.

Pada 2 Juni 2021, Natte Craess membagikan konten bernarasi seruan dan propaganda negatif yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan,

hambatan, dan gangguandari postingan akun facebook Petisi Rakyat Papua. Adapun unggahannya “Panggilan bergabung....Gerakan rakyat Papua dan solidaritas kepada rakyat Papua untuk masuk dalam Petisi Rakyat Papua... Petisi Rakyat Papua (PRP) adalah alat konsolidasi persatuan sikap rakyat West Papua terhadap status Otonomi Khusus yang berakhir tahun 2021. Petisi ini didukung oleh berbagai organisasi gerakan dan elemen rakyat Papua yang bersepakat bahwa: “Konflik politik Papua versus Indonesia dan segala dimensi persoalannya tidak terselesaikan dengan Otsus jilid I, dan tidak akan pula selesai dengan memperpanjang Otsus jilid II. Sehingga, jalan terbaik yang aman, damai dan demokratis adalah “kembalikan kepada rakyat West Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri”.

Selanjutnya pada 3 Juni 2021, Natte Craes membagikan postingan provokatif yang menyebutkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah rakyat Papua. Mereka tahu dimana letak perdamaian, kenyamanan, dan hidup dalam

persaudaraan yang abadi. Tetapi kenapa rakyat Papua mengungsi, karena terkena dampak operasi militer TNI/Porli, yang mengutamakan represi, tekanan, dan teror. Maka yang rakyat Papua dan TPNPB minta ke Jakarta segera tarik militer TNI/Polri dari Intan Jaya, Nduga, dan Puncak Papua.

Kemudian pada 5 Juni 2021, Natte menyebarkan narasi provokatif lainnya yang menyebutkan bahwa Bangsa Papua Akan Damai dan Tentram Hanya Ada Pada Referendum. Referendum itu sebuah demokrasi tertinggi di dunia. Dimana bangsa terjajah (West Papua), dan penjajah Indonesia akan sepakat mencari solusi damai yang adil, demokratis, dan bermartabat.

Akun tersebut digunakan untuk membagikan aktivitas pribadi dan menyebarkan konten propaganda negatif terhadap pemerintahan Joko Widodo berupa narasi, gambar dan video yang dapat menimbulkan ancaman. Selain itu, akun tersebut sangat massif menyebarkan konten perjuangan pergerakan separatis terorisme Papua.

Tabel 2. Pantauan Facebook Natte Craess

Akun Facebook	Natte Craess (Anggota KNPB) Teman: 726 orang
2 Juni 2021	Natte Craess membagikan konten bernarasi seruan dan propaganda negatif yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ATHG dari postingan akun facebook Petisi Rakyat Papua.
3 Juni 2021	Natte Craess membagikan postingan bermuatan provokatif, yakni dampak operasi militer yang membuat rakyat harus mengungsi. Operasi militernya seperti represi, tekanan, teror dan meminta segera menarik TNI/Polri.
5 Juni 2021	Membuat narasi provokatif yakni, <i>Bangsa Papua Akan Damai Dan Tentram Hanya Ada Pada Referendum.</i>

Sumber: Diolah oleh penulis, Facebook, 2021

Selain itu adapula akun facebook, Free West Papua Campaign yang didominasi oleh pemberitaan negatif mengenai Indonesia. pada 3 Juni 2021, akun tersebut menyebutkan bahwa Indonesia menuduh pemerintah Indonesia dengan sengaja memutus jaringan internet di wilayah Papua saat maraknya penangkapan terhadap aktivis pembebasan Papua.

Di tanggal 4 Juni 2021 dan 9 Juni 2021 juga masih menyebarkan pemberitaan militer serta Polri melakukan pembunuhan terhadap masyarakat Papua.

Efektivitas Propaganda Kesenjangan dan Alienasi dalam Menyulut Kekerasan di Papua

Dalam jurnal Propaganda Issues of Racism Through Social Media to Trigger Social Violence in Papua and West Papua in 2019 menyebutkan bahwa efektivitas dalam sebuah propaganda yang menyulut kekerasan di Papua menggunakan prinsip komunikasi, salah satunya prinsip kelompok target. Prinsip ini disebutkan untuk tahu dan memilih target pembaca yang tepat. Propaganda yang dibuat dan menyasar kelompok aktivis HAM, akademisi, dan kelompok

Tabel 3. Pantauan Facebook Free West Papua Campaign

Akun Facebook	Free West Papua Campaign 390.631 yang telah mengikuti
3 Juni 2021	Seruan negatif yang menyatakan bahwa, Indonesia memutus akses internet saat penangkapan para pemimpin pembebasan.
4 Juni 2021	Postingan tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan sipil (1 wanita, 2 laki-laki) oleh militer Indonesia saat melakukan razia di desa Nipulame.
9 Juni 2021	Pembantaian di Papua Barat yang dibunuh oleh militer dan polisi.

Sumber: Diolah oleh penulis, Facebook, 2021

yang mendukung kemerdekaan Papua. Mereka menasar targetnya, karena mereka adalah orang dan kelompok orang yang memiliki peran besar atau suara besar dalam menyuarakan ketertindasan, kesenjangan, serta alienasi dari pemerintah kepada masyarakat Papua yang ingin merdeka. Target yang dituju ini juga memiliki keterkaitan dalam isu pembangunan, mampu mendorong orang lain untuk bertindak sesuai dengan tujuan propaganda mereka dalam merubah opini yang ada (Nasution, 2020, 220-221).

Propaganda dengan isu kesenjangan dan alienasi ini sangat efektif untuk memobilisasi pergerakan yang mendukung identitas Papua yang dilecehkan dan dipinggirkan. Oleh karena itu, propaganda yang dilahirkan oleh target menjadi salah satu katalisator dalam efektivitas isu propaganda kesenjangan dan alienasi di Papua dalam hal penyulut gerakan separatis dengan cara teror.

Kesimpulan, Rekomendasi dan Pembatasan

Informasi yang ada dalam media dapat melegitimasi sebuah tindakan yang kuat dan memfasilitasi perubahan kelompok, tetapi juga membentuk perilaku individu yang merupakan pusat perubahan sosial yang lebih luas.

Media memainkan peran sebagai fasilitator pembentukan opini publik

serta kesalahan berpikir. Hal ini terletak pada proses negosiasi, yang dalam hal ini, audiens menerima pesan yang melibatkan berbagai faktor termasuk akun media mainstream saat itu dan sebelumnya, kepercayaan, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, hambatan struktural dan nilai-nilai. Media juga dapat memainkan peran sentral tidak hanya melegitimasi tindakan tertentu, tetapi juga menempatkan kepercayaan dan kredibilitas dalam versi tertentu dari arah yang memungkinkan untuk membentuk opini individu ataupun kelompok.

Peran media sangat dibutuhkan dalam pembentukan opini publik dan juga mengurangi ketidaksesuaian berpikir dari segala propaganda yang ada. Karena pada hakikatnya, propaganda adalah sebuah mekanisme yang digunakan orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan atau tujuan tertentu untuk meyakinkan publik tentang kejahatan musuh dan keadilan atas alasannya sendiri. Ketika propaganda menyebar melalui wacana publik, lalu diartikulasikan kembali oleh media itu pasti akan mempengaruhi opini publik.

Daftar Pustaka

- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2), 9-19.
- Ali, K., & Zain-ul-abdin, K. (2020). Post-Truth Propaganda: Heuristic Processing of Political Fake News on Facebook during The 2016 U.S. Presidential Election. *Journal of Applied Communication Research*, 1-20.
- Burton, Graeme. (2005). *Media and Society: Critical Perspective*. United Kingdom: Open University Press.
- Blades, J. (2020). West Papua: The Issue That Won't Go Away for Melanesia. Retrieved October 12, 2021, from Analysis website: <https://www.lowyinstitute.org/publications/west-papua-issues-wont-go-away-melanesia>.
- Castells, Manuel. (2007). Communication, Power, and Counter-Power in the Network Society. *International Journal of Communication*. 1, 238-266.
- Creswell, J.W. (2009). Mapping The Field of Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 3(2), 95-108.
- De Vreese, C. H., & Lecheler, S. (2015). Framing theory. *The International Encyclopedia of Political Communication*, 1-10.
- Djo, D. B. G. (2020). Ambivalensi Tindakan Represif Negara Atas konflik Papua. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 19-32.
- Lieberman, Ariel Victoria. (2017). Terrorism, the Internet, and Propaganda: A Deadly Combination. *Journal of National Security Law & Policy*, Vol. 9:95.
- Manurung, M. Y. (2020). Ini Alasan Pemerintah Sempat Blokir Internet Papua - Nasional Tempo.co. Retrieved September 10, 2021, from Read Tempo website: <https://nasional.tempo.co/read/1349449/ini-alasan-pemerintah-sempat-blokir-internet-papua>.
- Nasution, M. A. R., & Wiranto, S. (2020). Propaganda Issue of Racism Through Social Media to Trigger Social Violence in Papua and West Papua in 2019. *Jurnal Pertahanan. Media Informasi tentang Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identitas, Nasionalisme, & Integritas*, (6)2, 212-224.
- Ozeren, S., Hekim, H., Elmas, M. S., & Canbegi, H. I. (2018). An Analysis of ISIS Propaganda and Recruitment Activities Targeting The Turkish-Speaking Population. *International Annals of Criminology*, 56(1-2), 105-121.
- Padmi, M. F. M. (2019). Poverty, Deprivation, and Social Exclusion as Source of Violent Conflict: Case Study of West Papua Post-New Order Era. *Global Insight Journal*, 4(1).
- Ratriyanti, D. (2018). Papua, Separatisme dan Spiral Kekerasan. Retrieved October 16, 2021, from TELATAH website: <https://beritagar.id/artikel-amp/telatah/papua-separatisme-dan-spiral-kekerasan>.
- Spencer, Alexander. (2012). Lessons Learnt: Terrorism and the Media. *Arts & Humanities Research Council Public Policy Series*. No. 4.
- Steuter, Erin., Deborah Wills. (2008). *At War with Metaphor: Media, Propaganda, and Racism in the War on Terror*. United Kingdom: Lexington Books.

